

# SKRIPSI

## ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN MELALUI PDRB DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A MUH FAUZAN AL QADRI  
A011191100



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN MELALUI PDRB DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh:

**A MUH FAUZAN AL QADRI**  
**A011191100**



Kepada

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN**  
**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**



# SKRIPSI

## ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN MELALUI PDRB DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

**A MUH FAUZAN AL QADRI**  
**A011191100**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

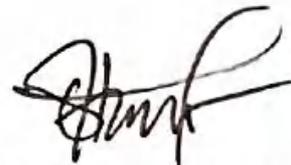
Makassar, 09 Juli 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Nursini, SE., MA.  
NIP. 19660717 199103 2 001

Pembimbing Pendamping

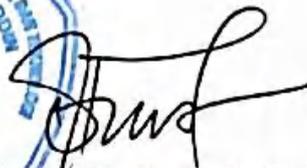
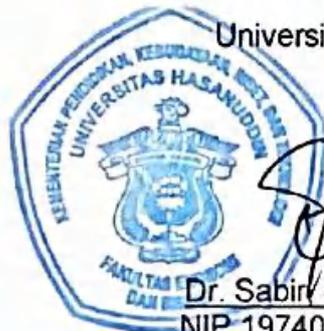


Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200112 1 003

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200212 1 003



# SKRIPSI

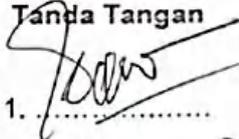
## ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN MELALUI PDRB DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

**A MUH FAUZAN AL QADRI**  
**A011191100**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 09 Juli 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Nursini, SE., MA.	Ketua	1. 
2	Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA	Anggota	3. 
4	Dr. Hamrullah, SE., M.Si. CSF.	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



  
Dr. Sabir, SE., M.Si. CWM  
NIP. 19740715 200212 1 003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245  
Telp. (0411) 583851, 585605 Pswt 2210, 2212, 2607, 2808 Fax. (0411) 587218  
Webmail: <http://feb.unhas.ac.id> Email: [feb@unhas.ac.id](mailto:feb@unhas.ac.id)

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : **A.MUH FAUZAN AL-QADRI**  
Nomor Pokok : A011191100  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Berjanji untuk memperbaiki dan menyerahkan Skripsi yang telah di revisi sesuai saran-saran penguji dan pembimbing selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari setelah tanggal hari ini. Jika melewati tanggal tersebut, maka saya bersedia untuk dilakukan ujian ulang.
2. Menyetujui jika sebagian atau seluruh isi dari Hasil Penelitian saya dipublikasikan oleh Dosen Pembimbing dan atau Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS dengan atau tanpa menuliskan nama saya.

Makassar, 9 Juli 2024

Mahasiswa



**A.MUH FAUZAN AL-QADRI**

No. Pokok: A011191100



## PRAKATA

### **Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.**

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah Subhana Wa Ta'ala atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan melalui PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, Penulis dengan senang hati menerima setiap kritik dan saran dari pembaca, agar skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat luas dengan membangkitkan semangat untuk melahirkan karya-karya yang baru. Penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Allah SWT. atas kehendak dan karunia-Nya yang memberikan penulis kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua penulis, Abdul Kadir, S.Kep., Ns. dan Andi Rosmawati, S.Kep., Ns. yang telah mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan lahir dan batin. Terima kasih telah menjadi orang tua yang berhasil membawa penulis hingga seperti saat ini.
3. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Fitriwati Djam'an, SE., M.Si., selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terimakasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi. Ibu Dewi Lestari, S.Si., M.S.E., selaku



penasihat akademik penulis. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama perkuliahan di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

4. Ibu Prof. Dr. Nursini, S.E., M.A., selaku dosen pembimbing Utama dan Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®, selaku dosen pembimbing pendamping. Terimakasih untuk setiap kritik, saran, serta bimbingan penulis selama penyusunan skripsi.
5. Ibu Prof. Dr. Rahmatia, S.E., M.A., dan Bapak Dr. Hamrullah, S.E., M.Si., CSF., selaku dosen penguji, terimakasih untuk pertanyaan serta kritik dan saran yang membangun yang disampaikan pada saat seminar proposal dan ujian skripsi, dari hal itu penulis memperoleh banyak pengetahuan baru.
6. Seluruh Dosen FEB-UH yang telah memberi ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, nasehat kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddi.
7. Segenap staf dan karyawan akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terkhusus Pak Aspar, Pak Oscar, Pak Rahim, dan Ibu Dama yang telah banyak membantu dalam berbagai hal selama masa studi penulis.
8. Ananaka di lorong No Baper-Baper Bosku (Po\*nh\*b) yang selalu menjadi tempat pulang yang nyaman.
9. Ananaka Joker Merah yang telah menjadi teman hidup dan banyak membantu dalam menyelesaikan masa-masa berat, Jangan Mati Dulu.
10. Ananaka Komunitas Weser Kiri (KWK) yang selalu jadi teman jalan.
11. Ananaka Mawapres Unhas yang telah memberikan ruang kreasi dan ruang

dup, tetaplh bumi.

nanaka DE.IE yang dari maba selalu di kostnya Kurca dan Bani ditunggu  
art 2 nya.

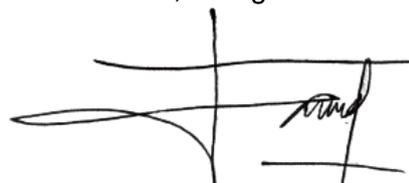


13. D/27 rumahnya ananaka tawwa, mau diganti kolam lelenya jadi kolam renang.
14. Teman-teman Expost1816 yang sedari masa-masa minum extrajoss susu telah kebersamai perjuangan hidup.
15. Teman-teman Intresa Smudama 21, yang telah kebersamai perjuangan hidup melawan rammusu2nya tinggal di Malino, sakpal2nya naik pete-pete, kalian semua hebat.
16. Teman-teman GRIFFINS Ilmu Ekonomi angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama dalam proses perkuliahan. Terima kasih telah kebersamai penulis bisa berproses sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
17. KKN 109 Bira Dan Anana Warlok Bira terima kasih atas kue uhu-uhunya, jalan-jalannya, bale-balenya Qafuk yang takkan penulis pernah lupakan saat masa kkn.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat serta penulis memohon maaf jika selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak merepotkan dan menyusahkan semoga Allah SWT. senantiasa membalas kebaikan yang diberikan kepada penulis. Sekali lagi, penulis ucapkan syukur tiada henti kepada Allah SWT. Alhamdulillah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 18 Agustus 2024



A Muh Fauzan Al Qadri



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRAC.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	10
2.1.2 Produk Domestik Regional (PDRB).....	12
2.1.3 Kemiskinan.....	14
2.1.4 Investasi.....	15
2.1.5 Belanja Modal Pemerintah.....	20
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	21
2.2.1 Hubungan Penanaman Modal Asing dengan PDRB.....	21
2.2.2 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan PDRB.....	22
2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PDRB.....	23
2.2.4 Hubungan Penanaman Modal Asing dengan Kemiskinan.....	24
2.2.5 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Kemiskinan.....	25
2.2.6 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Kemiskinan.....	26
2.2.7 Hubungan PDRB dengan Kemiskinan.....	27
Penelitian Terdahulu.....	28



2.4 Kerangka Konseptual Penelitian .....	31
2.5 Hipotesis Penelitian .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	34
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	34
3.4 Metode Analisis Data .....	35
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian .....	38
4.1.1 Perkembangan Variabel Tingkat Kemiskinan dan PDRB.....	38
4.1.2 Perkembangan Variabel Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.....	39
4.1.3 Perkembangan Variabel Pengeluaran Pemerintah .....	40
4.2 Hasil Estimasi .....	42
4.2.1 Pengaruh PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB.....	43
4.2.2 Pengaruh Langsung PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan.....	44
4.2.3 Pengaruh Tidak Langsung PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan Melalui PDRB.....	45
4.3 Pembahasan.....	46
4.3.1 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Penanaman Modal Asing terhadap Kemiskinan Melalui PDRB.....	46
4.3.2 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Kemiskinan Melalui PDRB .....	48
4.3.3 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan Melalui PDRB.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2011-2022 .....	4
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	32
Gambar 4.1 Perkembangan Variabel Tingkat Kemiskinan Dan PDRB.....	38
Gambar 4.2 Perkembangan Variabel Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) .....	39
Gambar 4.3 Perkembangan Variabel Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rupiah)	41



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 .....	3
Tabel 4.1 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan Kemiskinan.....	42
Tabel 4.2 Hasil Estimasi pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan total pengaruh antar variabel .....	45



## ABSTRAK

### ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN MELALUI PDRB DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A Muh Fauzan Al Qadri  
Nursini  
Sabir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan melalui PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa data times series tahunan. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang dicatat dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2022. Metode yang digunakan adalah analisis persamaan struktural yaitu two stage least square ( 2SLS). Adapun hasil penelitian yaitu variabel Penanaman modal asing (PMA) berpengaruh negatif secara langsung namun, tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui PDRB di Sulawesi Selatan. Variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara langsung berpengaruh negatif namun, secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui PDRB di Sulawesi Selatan. Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif secara langsung namun, tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui PDRB di Sulawesi Selatan.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, PDRB, PMA, PMDN, Pengeluaran Pemerintah.



## ABSTRAC

### ANALYSIS OF THE IMPACT OF INVESTMENT AND GOVERNMENT EXPENDITURE ON POVERTY THROUGH GDP IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

A Muh Fauzan Al Qadri  
Nursini  
Sabir

This research aims to analyze the impact of foreign direct investment, domestic investment, and government expenditure on poverty through GDP in South Sulawesi Province. The type of data used is quantitative data in the form of annual time series data. The data source for this research is secondary data recorded from the Central Statistics Agency of Indonesia (BPS) and the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of South Sulawesi Province from 2006 to 2022. The method used is structural equation analysis, specifically the two-stage least squares (2SLS) approach. The results of the study indicate that the foreign direct investment (FDI) variable has a direct negative impact, but it does not have an indirect impact on poverty through GDP in South Sulawesi. The domestic investment (DI) variable has a direct negative impact, but it does not have an indirect impact on poverty through GDP in South Sulawesi. The government expenditure variable has a direct negative impact, but it does not have an indirect impact on poverty through GDP in South Sulawesi..

**Keywords:** Poverty, GDP, FDI, DI, Government Expenditure.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang paling umum dan kompleks di dunia modern. Dalam banyak kasus, tingkat kemiskinan bahkan menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah suatu negara, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Sifatnya yang multidimensional menyebabkan penanganan kemiskinan tidak terbatas pada hubungan sebab-akibat semata, tetapi juga melibatkan preferensi, nilai, dan politik (Purnama, 2016). Kemiskinan tidak hanya mencakup keterbatasan pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan infrastruktur yang mendasar. Selain itu, aspek sosial, psikologis, dan budaya juga memainkan peran penting dalam menguatkan atau mengurangi fenomena kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi di dalam suatu negara harus diperhatikan sebagai masalah yang serius, karena kemiskinan membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Istilah kemiskinan adalah ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kemakmuran ekonomi yang sesuai dengan standar hidup disuatu wilayah tertentu (Budianto, 2022). Fenomena ini tidak hanya mengganggu kesejahteraan individual, tetapi juga dapat memiliki dampak yang merugikan bagi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara.



Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan melalui kemiskinan sebagai tolok ukur efektivitas kebijakan dan

program pembangunan yang telah ditetapkan (Asfar, dkk., 2022). Oleh karena itu, kemiskinan sangat erat kaitanya dengan pembangunan ekonomi, mengingat term ini adalah dua sumbu yang tak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan pemerintah Indonesia demi tercapainya kesejahteraan umum. Permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara yang menyangkut kesejahteraan masyarakat adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sri, 2010).

Pertumbuhan ekonomi akan dapat tercapai apabila perekonomian mengalami peningkatan proses produksi barang dan jasa secara terus menerus diberbagai sektor atau kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Sadono (2006) bahwa proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi yang dapat mempengaruhi suatu daerah antara lain: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan kemajuan teknologi. Untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi maka sumber daya manusia dan sumberdaya alam harus tersedia serta peningkatan efisensi penggunaan faktor produksi.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan yaitu jumlah penduduk yang tinggi dan angkatan kerja yang besar. Menurut Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk menunjang tambahan permintaan, namun, di sisi lain kenaikan jumlah penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan

an.

Permasalahan kemiskinan di Sulawesi Selatan menjadi kompleks wilayahnya yang luas, keragaman kondisi sosial budaya masyarakat,



serta pengalaman kemiskinan yang beragam. Masalah ini juga bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga melibatkan kerentanan dan risiko terhadap kemiskinan, kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, dan adanya ketidakadilan dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. (Nurlita, dkk., 2017).

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2018	8,748,052	792,630	9.061
2019	8,819,549	767,800	8.705
2020	9,073,509	776,830	8.561
2021	9,139,531	784,980	8.588
2022	9,225,747	777,440	8.426

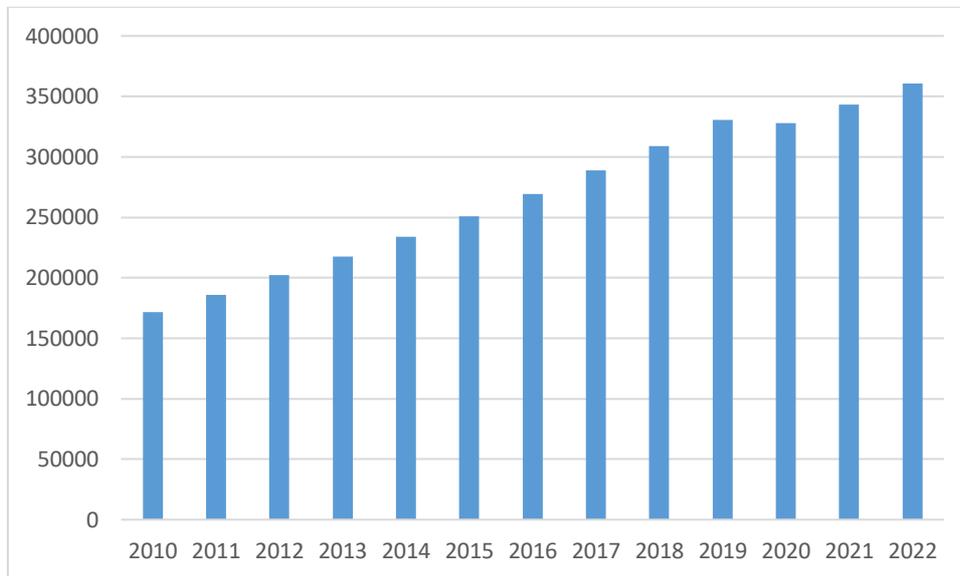
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah populasi penduduk terus mengalami peningkatan sejak lima tahun terakhir. sementara itu, jumlah penduduk miskin mengalami fluktuatif serta persentase penduduk miskin mengalami penurunan yang lambat. Salah satu upaya untuk memberantas kemiskinan adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan diharapkan akan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memberikan akses yang lebih baik kepada layanan dasar.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan signifikan sering dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan



ekonomi bisa menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk program-program kesejahteraan sosial.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (2023)

**Gambar 1.1 Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2022**

Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan selama 13 tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan di sekitar 6-8 persen di periode sebelum krisis ekonomi Covid-19. Pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan di kisaran 5 persen. Pertumbuhan yang kuat dapat mendukung pengurangan terhadap kemiskinan (World Bank, 2018). Dampak tersebut dapat dirasakan sebagian besar penduduk yang masih belum memiliki keamanan secara ekonomi sehingga membutuhkan pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka



Saat mengevaluasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari sisi kemiskinan, penting untuk

mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi dinamika tersebut. Investasi dan pengeluaran pemerintah memainkan peran sentral dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya bahwa investasi merupakan komponen mendasar dalam pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Penting untuk menentukan strategi investasi yang akan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat menambah pendapatan, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Sementara itu, besarnya jumlah penduduk miskin berpotensi menciptakan permasalahan sosial yang rumit, seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial politik, meningkatnya angka kriminalitas dan dampak-dampak lainnya.

Menurut teori Nurkse kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan (*vicious circle of proverty*). Rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Proses melingkar ini menyebabkan masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinannya jika tidak ada intervensi dari luar. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan investasi, membuka lapangan kerja, menyerap angkatan kerja, yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan penelitian Supratyoningsih & Yuliarmi (2022) menyatakan bahwa kemiskinan berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mensejahterahkan masyarakat, dimana antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan

hasilan rendah sama-sama dapat menikmati hasil dari tingginya pertumbuhan ekonomi.

Salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan



adalah investasi. Investasi dalam perekonomian adalah sebagai faktor produksi yang meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah sehingga PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) meningkat yang akan mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Investasi berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, peranan investasi merupakan salah satu faktor penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Suindyah, 2011).

Investasi yang dilakukan di suatu daerah, baik itu asing (PMA) maupun domestik (PMDN) akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja sehingga proses produksi menjadi produktif (Paramita & Christianingrum, 2017). Investasi asing di dalam masyarakat pertama-tama akan sangat membantu dan menambah kesempatan kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah begitu juga dalam jaringan yang lebih luas dimana akan menambah pendapatan nasional suatu negara. Meratanya investasi di setiap daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga kemudian akan memperkecil kesenjangan pendapatan yang terjadi antar daerah.

Penting untuk menentukan strategi investasi yang akan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat menambah pendapatan,

pertumbuhan ekonomi meningkat. Sementara itu, besarnya jumlah  
k miskin berpotensi menciptakan permasalahan sosial yang rumit,  
menurunnya kualitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan



dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial politik, meningkatnya angka kriminalitas dan dampak-dampak lainnya.

Peran strategis pemerintah dalam pembangunan merupakan elemen yang sangat penting. Pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja modal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang (Salhab & Soedjono, 2012).

Dalam teori Keynesian, pengeluaran pemerintah memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, dimana ketika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi dilihat dari pendapatan dan tingkat output (Mankiw, 2003). Upaya penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari jumlah pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah yang terus meningkat setiap tahun diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Pengeluaran pemerintah juga tidak hanya melihat jumlahnya saja tapi juga melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah (De Fina, 2002).

Melalui instrumen fiskal yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah banyak melakukan pengeluaran yang berorientasi ke sarana dan prasarana atau infrastruktur publik maka sektor-sektor perekonomian pun akan saling bergerak dalam mempermudah kegiatan ekonomi.

Provinsi Sulawesi Selatan adalah wilayah yang memiliki potensi yang signifikan, dengan berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, perikanan, dan pariwisata. Namun, kemiskinan masih menjadi masalah yang mempengaruhi sebagian besar penduduknya. Oleh karena itu, penelitian



ini akan mengeksplorasi **Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan melalui PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui PDRB?
2. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui PDRB?
3. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui PDRB?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi selatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui PDRB.
2. Untuk mengetahui Penanaman modal dalam negeri terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui PDRB.
3. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat emiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui PDRB.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan, dipakai sebagai bahan akademik dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya dan, sebagai salah satu sumber informasi tentang permasalahan perkembangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai "kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak identik dengan "pembangunan" (*development*). PDB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. (Mankiw, 2021).

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.



Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar.

Ada tiga komponen utama dalam menentukan pertumbuhan ekonomi setiap bangsa. Pertama, akumulasi modal, meliputi semua bentuk investasi baru yang ditanamkan seperti tanah, peralatan fisik, serta sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Kedua, Pertumbuhan jumlah penduduk, yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, Kemajuan teknologi, yang diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan pekerjaan.

Akumulasi modal diperoleh bila sebagian dari pendapatan yang diterima saat ini ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan meningkatkan output dan pendapatan di masa yang akan datang. Pengadaan pabrik-pabrik, mesinmesin, peralatan dan bahan baku akan meningkatkan stok modal (capital stock) dan tingkat output yang ingin dicapai. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus ditopang oleh berbagai investasi penunjang yang disebut dengan investasi infrastruktur sosial dan ekonomi. Pengadaan infrastruktur ini meliputi pembangunan jalan, penyediaan energi listrik, penyediaan sarana air bersih, perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi, dan sebagainya. Keseluruhan dari adanya penyediaan infrastruktur ini sangat dibutuhkan dalam menunjang dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas ekonomi dalam suatu negara.

Selanjutnya terdapat teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Solow dikenal dengan model pertumbuhan Solow (Solow growth model). Model ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana persediaan modal,



pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa di suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2021).

Teori pertumbuhan klasik menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitik beratkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

Teori Schumpeter Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terusmenerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber barang mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatanperusahaan.

### **2.1.2 Produk Domestik Regional (PDRB)**

Kuncoro (2001) menilai pendekatan pembangunan klasik diartikan dengan mempertimbangkan perkembangan PDRB suatu provinsi, daerah atau kota. Produk domestik bruto regional (PDRB) merupakan indikator penting yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu (Sukirno,



Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan PDRB sebagai nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai status perekonomian suatu daerah. PDRB diperoleh dengan menghitung total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi di suatu wilayah (Sasana dalam Syahrullah, 2014).

Sadono Sukirno (2004) terdapat tiga pendekatan dalam menghitung produk domestic bruto (PDRB), yaitu:

1. Pendekatan produksi, dihitung atas barang dan jasa yang dihasilkan pada produksi di suatu wilayah
2. Pendekatan pendapatan, dihitung dari hasil pendapatan yang diterima dari faktor produksi dan ikut dalam proses produksi di suatu wilayah.
3. Pendekatan pengeluaran, dihitung dari hasil semua pengeluaran, yaitu: konsumsi rumah tangga, lembaga swasta dan ekspor neto.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah pada suatu produk tertentu. PDRB terdiri dari dua cara penyajian, yaitu:

1. PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, bertujuan untuk memahami struktur perekonomian.
2. PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga tahun dasar dan dirancang untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.



### 2.1.3 Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena yang sering kali dijumpai dalam bermasyarakat. Kemiskinan juga sering dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata, padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai program dan kebijakan yang telah hadir untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, tetapi statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat. Rendahnya tingkat kehidupan dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu rantai dalam lingkaran kemiskinan (Andre, 2002).

Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas) pada tahun 2004 mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) Kesehatan pendidikan, pekerjaan, perumahan air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Todaro (2006) mengatakan besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (poverty line). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif.

Penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi adalah akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia (Kuncoro, 2006). Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan, kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah, yang pada



gilirannya upahnya juga rendah. Selain itu, kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik maupun daya tahan pikir.

#### 2.1.4 Investasi

Menurut Tandelilin (2010) investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa datang. Menurut Helianto (2013) investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.

Menurut Arifin (2005), investasi adalah kegiatan menunda konsumsi untuk mendapatkan (nilai) konsumsi yang lebih besar di masa yang akan datang. Investasi yang diutamakan pada salah satu indikator penting dalam kaitan dengan pendapatan nasional. Menurut Ahmad Kamaruddin (2006:), investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan dimasa depan". Secara umum tujuan investasi memang mencari untung, tetapi bagi perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama yang lain selain untuk mencari untung. Pada umumnya tujuan investasi adalah sebagai berikut: Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain (a) seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lain (b) Untuk membentuk suatu sus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. (c) mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui kepemilikan



sebagai ekuitas perusahaan tersebut, (d) Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang di hasilkan, (e) Untuk mengurangi persaingan diantara perusahaan-perusahaan yang sejenis. (f) Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.

Fungsi Investasi yaitu sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu yang relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Penanaman modal yang di tanamkan dalam arti sempit berupa proyek tertentu baik bersifat fisik maupun non fisik seperti proyek pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung dan proyek penelitian dan pembangunan (Kasmir dan Jakfar, 2012). Fungsi investasi yang kedua yaitu kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional.

Berdasarkan Teori Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes dalam jangka pendek menjadi suatu kerangka analisis makro jangka panjang (Martadinata, 2022). Aspek utama yang dikembangkan dari teori Keynes adalah peran investasi dalam jangka panjang. Dalam teori Keynes, pengeluaran investasi memengaruhi permintaan agregat. Namun, Harrod-Domar melihat pengaruh investasi dari perspektif waktu yang lebih luas. Menurut kedua ekonom ini, pengeluaran investasi tidak hanya memiliki dampak (melalui proses multiplier) terhadap permintaan agregat, tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif jangka panjang, investasi berdampak pada pembentukan stok modal, seperti pabrik, jalan, dan infrastruktur lainnya.

Pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal tidak



hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Menurut teori Harrod-Domar, untuk meningkatkan laju perekonomian, maka diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok tambahan modal.

### 2.1.3.1 Penanaman Modal Asing

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (1999) memberikan rumusan bahwa Investasi asing mencerminkan tujuan untuk memperoleh kepentingan yang berlangsung lama oleh suatu entitas penduduk dalam suatu ekonomi dalam suatu entitas penduduk dalam ekonomi yang berbeda dengan investor. Kepentingan yang berlangsung lama mengimplikasikan adanya hubungan jangka panjang antara investor langsung dan perusahaan serta tingkat pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan perusahaan. Investasi langsung melibatkan transaksi awal antara kedua entitas tersebut dan semua transaksi modal selanjutnya antara mereka dan di antara perusahaan afiliasi, baik yang terinkorporasi maupun tidak terinkorporasi.

Teori ekonomi klasik tentang penanaman modal asing menyatakan bahwa penanaman modal asing secara keseluruhan menguntungkan ekonomi negara penerima modal. Faktor yang mendukung pandangan ini pertama, merupakan fakta bahwa modal asing yang dibawa ke negara pemilik modal menjamin bahwa modal nasional/domestic yang tersedia dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Masuknya modal dan penanaman modal asing kembali oleh penanaman modal asing yang berasal dari keuntungan yang tidak dikembalikan ke negaranya, akan meningkatkan tabungan negara penerima modal. Penghasilan pemerintah melalui pajak meningkat dan pembayaran-pembayaran lain juga akan meningkat. Kedua, Penanaman



modal asing biasanya membawa serta teknologi yang terdapat di negara pemilik modal dan menyebarkan teknologi tersebut di dalam negara penerima modal. Ketiga, dengan masuknya modal asing berarti terciptanya lapangan baru. Tanpa penanaman modal asing kesempatan untuk bekerja tidak akan dicapai.

### 2.1.3.2 Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal yang digunakan untuk melakukan suatu usaha di dalam negeri yaitu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri (investor) dengan menggunakan modal dalam negeri. Menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penggunaan Modal Dalam Negeri merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia yang meliputi hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh Negara maupun swasta yang bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan suatu usaha.

Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan instrument penting yang menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi suatu wilayah yang sedang berkembang dan memberikan kontribusi untuk membantu proses pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena apabila tingkat Penanaman Modal Dalam Negeri mengalami kenaikan maka secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi suatu

(Jufrida, 2016).



Tujuan Penanaman Modal Dalam Negeri tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Pasal 3 Ayat 2 Tahun 2007 yang terdiri dari: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja, Meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri secara umum adalah Potensi Sumber Daya Alam Potensi sumber daya alam meliputi kondisi lingkungan sekitar seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan dan penurunan angka korupsi suatu daerah. Adapun sektor penopang untuk meningkatkan Penanaman Modal Dalam Negeri dalam suatu Negara dapat dilihat dari potensi Sumber Daya Alam meliputi sektor pariwisata, sektor tersebut. Suku bunga merupakan suatu indikator atau acuan yang digunakan sebagai penentuan tingkat pengembalian modal atas resiko yang ditanggung oleh pemilik modal (investor) dan digunakan dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Tingkat suku bunga dapat dijadikan sebagai landasan atau ukuran layak atau tidaknya suatu usaha atau investasi yang sedang dijalankan. Tingkat suku bunga yang tinggi akan menghambat proses penanaman modal, sedangkan tingkat suku bunga rendah akan mendorong pengusaha melakukan investasi karena biaya pemakaian dana yang lebih kecil. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan Penanaman Modal Dalam Negeri pemerintah pusat dan Bank Indonesia sepakat untuk menurunkan tingkat suku bunga (rate). Hal ini dilakukan supaya calon investor maupun investor yang berminat untuk melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri. Pendapatan Nasional memiliki pengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri, hal ini dikarenakan investasi merupakan bagian dari pendapatan nasional.



### 2.1.5 Belanja Modal Pemerintah

Pengeluaran pemerintah secara makro yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya seluruh perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesobroto, 2001).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata melalui belanja negara baik itu belanja rutin maupun belanja pembangunan. Menurut Basri dan Subri (2003), pengeluaran pemerintah itu sangat bervariasi, namun secara garis besarnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:



Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.

- 2) Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- 3) Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap masa yang akan datang. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli yang luas.

Kunarjo (1996) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan antara permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan negara harus ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus dapat menggali sumber-sumber penerimaannya yang sebagian besar berasal dari pajak.

Walaupun secara keseluruhan pengeluaran pemerintah sangat penting dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting lagi adalah penentuan komposisi dari pengeluaran pemerintah tersebut. Komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan strategi untuk mencapai sasaran dari pembangunan nasional. Berdasarkan komposisi dari pengeluaran tersebut akan terjawab suatu pertanyaan yaitu pengeluaran mana yang kiranya lebih diprioritaskan apakah pengeluaran rutin harus lebih besar dari pengeluaran pembangunan atau sebaliknya.

## 2.2 Hubungan Antar Variabel

### 2.2.1 Hubungan Penanaman Modal Asing dengan PDRB

Investasi asing memainkan peran penting pada perekonomian negara-negara berkembang. Ini mempengaruhi skenario pekerjaan, produksi, harga, perdagangan, impor, ekspor, kesejahteraan umum negara penerima, dan neraca



pembayaran. Selain itu, PMA berfungsi sebagai salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi (Hussain & Haque, 2016). Lainatu dkk, 2016 menunjukkan bahwa secara parsial penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2010-2013. Hal ini berarti apabila nilai penanaman modal asing mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat karena memiliki pengaruh yang positif. Nilai penanaman modal asing 33 provinsi di Indonesia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena didorong oleh beberapa hal, yaitu perekonomian Indonesia yang sehat, stabilitas politik, iklim investasi di Indonesia, infrastruktur di Indonesia, sumber daya alam yang melimpah, keadaan demografis, adanya pasar domestik dan peran global Indonesia.

Hasil penelitian Zekarias (2016), Ibrahim dan Dahie (2016), Iamsiraroj (2016), Mahriza dan Amar (2019), Tran dan Hoang (2019) dan Ain (2021) menunjukkan bahwa investasi asing berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan hasil penelitian Alvaro (2021) menunjukkan bahwa investasi asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **2.2.2 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan PDRB**

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh kaum Neo- Klasik menekankan peranan modal yang dimiliki suatu negara. Modal yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri akan membantu perekonomian suatu negara. Investasi dalam negeri atau yang juga dikenal dengan nama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dianggap mampu mendorong perekonomian suatu

perkembang dengan sangat baik, dimana jika investasi yang terjadi di



dalam negeri mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Jufrida, 2016).

Hasil penelitian Trisnu dan Purbadharmaja (2014), Jufrida, dkk (2016), Ibrahim dan Dahie (2016), Emmanuel dan Kehinde (2018) Mahrisa dan Amar (2019), Tran dan Hoang (2019) menunjukkan bahwa investasi dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan hasil penelitian Lean dan Tan (2011) menunjukkan bahwa investasi dalam negeri berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

Adianto (2011) menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini disebabkan penambahan Investasi akan meningkatkan perekonomian yang nantinya akan meningkatkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa PMDN sangatlah penting bagi pembangunan ekonomi yang dialokasikan kedalam proyek pembangunan, yang berarti akan menambah kapital yang ada dalam suatu perekonomian. Selanjutnya, tambahan kapital tersebut akan berakibat peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### 2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PDRB

Peran pemerintah dalam mengatur pengeluarannya merupakan instrument penting untuk mengendalikan perekonomian. Banyak ekonom berpendapat bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengeluaran

ah dalam bentuk belanja modal dapat memberikan kontribusi positif bagi  
 han ekonomi. Model pertumbuhan endogen (Barro, 1990) menjelaskan  
 pengeluaran pemerintah yang produktif akan mempengaruhi tingkat



pertumbuhan. Salah satu pengeluaran pemerintah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal berupa penyediaan infrastruktur seperti listrik, transportasi, pendidikan dan kesehatan, guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sabir, 2015).

#### **2.2.4 Hubungan Penanaman Modal Asing dengan Kemiskinan**

Menurut Nurul Faizah (2014) dalam penelitiannya mengatakan PMA memberikan kontribusi yang sangat minim bagi penurunan kemiskinan. Hal ini disebabkan karna rendahnya tingkat Pendidikan yang dimiliki masyarakat miskin sehingga tidak mampu menyerap lapangan pekerjaan yang disediakan oleh PMA.

Berbeda dengan hasil penelitian Hanifah Safitri dan saleh (2020) pengaruh signifikan dari PMA terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa PMA mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan adanya investasi swasta, suatu daerah dapat mengembangkan produk-produk barang dan jasa yang bernilai sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah tersebut.

Menurut Sianipar dan Panjaitan (2008) Penanaman Modal Asing memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan. Dengan dilakukannya Penanaman Modal Asing, akan tercipta investasi-investasi dan hubungan baru dengan Luar Negeri berupa barang-barang modal baru dan penyerapan faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru, kesempatan yang menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Penanaman Modal Asing menjadi faktor penting karena berhubungan pencapaian tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan keluasan akses pasar internasional. Disamping itu, masuknya Penanaman Modal Asing dalam jumlah yang signifikan dapat memberikan angin segar bagi perekonomian makro, memperbaiki



kinerja neraca pembayaran dan lalu lintas modal akan mengalami surplus besar. Namun yang perlu diperhatikan, konsekuensi dari Penanaman Modal Asing adalah hanya industri-industri yang efisien dan mampu berdaya saing yang akan menamakan investasinya. Dengan demikian, semakin banyaknya Penanaman Modal Asing yang masuk akan menyebabkan pendapatan baru pada faktor produksi yang menyebabkan pertambahan pendapatan Nasional sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan berkurangnya tingkat pengangguran (karena tercipta lapangan kerja baru) dan pertumbuhan ekonomi yang positif akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. (Nur, 2021).

### **2.2.5 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Kemiskinan**

Dalam suatu wilayah atau Negara pasti tidak terlepas dari permasalahan kurangnya modal baik berupa tabungan dan investasi serta masalah kemiskinan. Harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, sehingga keterlibatan sektor swasta sangat diperlukan serta penyerapan kemiskinan yang belum maksimal. Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dibutuhkan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Terjadinya kenaikan dan penurunan Penanaman Modal Dalam Negeri dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan keberhasilan pembangunan, sehingga selaras dengan konsep penurunan kemiskinan. Diharapkan adanya kenaikan Penanaman Modal Dalam Negeri dapat berpengaruh positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, (Elilia, 2019).

Teori Harrod-Domar pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Artinya apabila tabungan dan investasi naik, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan naik. Sehingga apabila terdapat



modal masuk untuk diinvestasikan, maka dampaknya terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan berdampak pada pembukaan kesempatan kerja yang baru di dalam negeri dan menyerap banyak tenaga kerja. Proyek-proyek baru PMDN tersebut akan menambah/menaikkan tingkat pendapatan masyarakat (indikator pertumbuhan ekonomi) dan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi turunnya tingkat kemiskinan. Sedangkan dalam penelitian Safitri dan Saleh (2020) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di dengan demikian pemerintah agar melakukan usaha-usaha guna peningkatan investasi PMDN seperti meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi terlaksananya berbagai proyek investasi dalam dalam negeri.

### 2.2.6 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Kemiskinan

Peran pemerintah sangatlah penting untuk mengatur jalannya perekonomian agar tercipta stabilitas pada sistem perekonomian. Secara umum peranan adalah untuk: 1) mengalokasikan sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang yang berasal dari barang swasta atau barang publik; 2) melakukan distribusi sumber daya bagi masyarakat guna mensejahterakan masyarakatnya dengan subsidi pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui anggaran kebijakan; (3) selanjutnya adalah sebagai stabilitator perekonomian, Pemerintah dapat menstabilkan keadaan ekonomi agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah sehingga perekonomian yang kondusif (Mangkoesoebroto, 2001).

Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi,



pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah terus naik dari tahun ke tahun dengan harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan (Pratama & Utama, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Dahiri & Wibowo (2019) menyatakan bahwa belanja pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki hubungan negatif dengan angka kemiskinan.

### 2.2.7 Hubungan PDRB dengan Kemiskinan

Teori trickle-down effect yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) dan diperluas oleh Ranis dan Fei (1968). Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya.

Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya

tan kemiskinan sebagai akibat dari meningkatnya ketimpangan  
 an yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak  
 k kaya dibanding penduduk miskin. Oleh sebab itu, maka dapat



disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bilamana pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin.

Siregar (2006) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan, sedangkan syarat kecukupannya (*sufficient condition*) adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Asfar, dkk. (2022) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi, angkatan kerja, pengeluaran pemerintah, dan IPM terhadap Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Kemudian investasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tenaga kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu pun pengeluaran pemerintah terhadap indeks



pembangunan manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi sulawesi selatan. Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan.

Supratyoningsih & Uliarmi (2022) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali; mengetahui pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali; mengetahui pengaruh tidak langsung investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; 2) Investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan; 3) Investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Aminah (2016) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh swasta dan belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Jambi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Temuan dari penelitian ini



menunjukkan bahwa investasi swasta dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Helly suharlina (2019) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi, pengangguran, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan serta hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di provinsi kalimantan barat. Hasil penelitian yaitu: Investasi dan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di provinsi kalimantan barat sedangkan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di provinsi kalimantan barat, serta kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di provinsi kalimantan Barat.

Irhamni (2018) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka panjang; pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka panjang; pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka panjang; dan jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan dalam jangka panjang.



## 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu hubungan investasi dan pengeluaran Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan melalui PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan. Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dimana variabel independen dalam penelitian ini adalah Penanaman Modal Asing (X1), Penanaman Modal dalam Negeri (X2), dan pengeluaran pemerintah (X3). Sedangkan variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan (Y2). Serta variabel intermediasi (penghubung) adalah PDRB (Y1). Variabel-variabel ini akan mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan di latar belakang.

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dimana variabel independen dalam penelitian ini adalah Penanaman Modal Asing (X1), Penanaman Modal dalam Negeri, dan pengeluaran pemerintah (X3). Sedangkan variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan (Y2). Serta variabel intermediasi (penghubung) adalah PDRB (Y1). Variabel-variabel ini akan mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan di latar belakang.

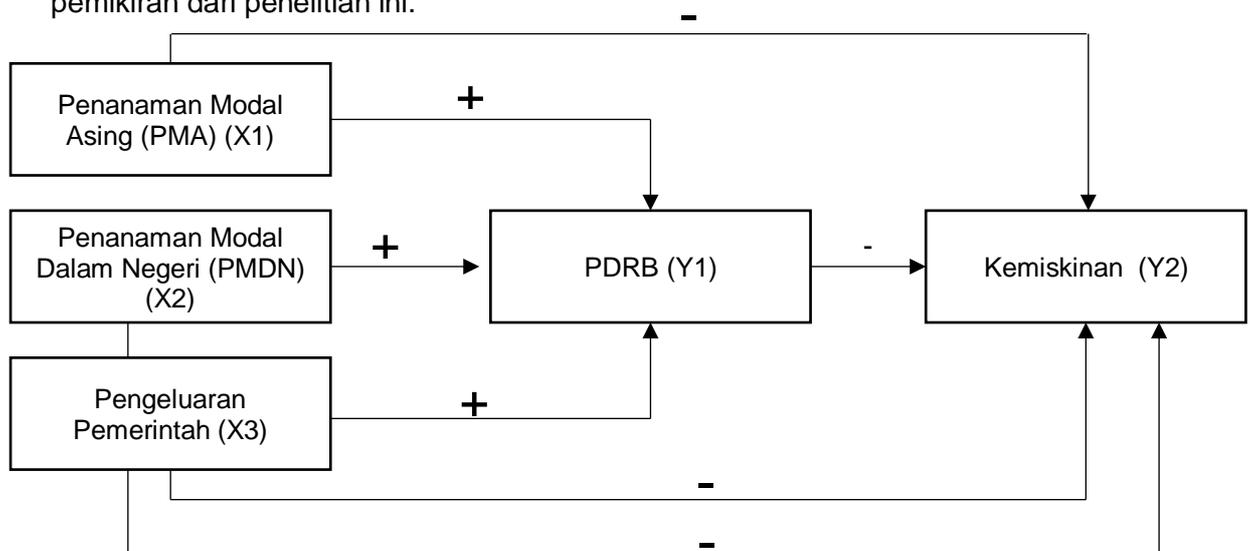
Hubungan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut, ketika terjadi peningkatan investasi baik melalui Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal dalam Negeri maka akan

membelian barang modal dan perlengkapan produksi sehingga menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan. Para



ekonomi menyatakan investasi dan ekspor adalah motor pertumbuhan ekonomi atau “engine of growth”. Selain itu, dapat membawa teknologi dan keahlian baru ke dalam suatu negara. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas teknologi dalam negeri dan memajukan sektor-sektor tertentu, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Upaya dalam peningkatan pembangunan dan penurunan angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan gizi yang merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan.

Sehubungan variabel tersebut maka gambar 2.1 menunjukkan kerangka pemikiran dari penelitian ini.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian**

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian maka dapat dirumuskan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Diduga penanaman modal asing berpengaruh negatif terhadap



- kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB.
2. Diduga penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB.
  3. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB.

